

# REFERENDUM SWISS DAN JALAN PANJANG MENUJU KEBERTERIMAAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Wiko Saputra, Muhammad Ichsan, Anita Permatasari

**51,6%** rakyat Swiss menyetujui masuknya perjanjian kerjasama mengenai perdagangan minyak sawit dalam *Indonesia-European Free Trade Association (EFTA)-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA)*;

Hasil referendum Swiss berpotensi **meningkatkan citra positif** dan keberterimaan minyak sawit Indonesia dalam perdagangan global;

Referendum Swiss selayaknya menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk **memperkuat diplomasi** perdagangan minyak sawit dengan mengedepankan perbaikan aspek-aspek berkelanjutan bagi industri kelapa sawit nasional.

## PENDAHULUAN

Tepat 7 Maret 2021, Pemerintah Swiss melakukan referendum untuk memutuskan kesepakatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the European Free Trade Association (EFTA) States and Indonesia (IE-CEPA)*. Sebuah kesepakatan kerjasama perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan EFTA. EFTA terdiri atas empat negara yang memilih untuk tidak masuk ke dalam Uni Eropa yakni, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

Referendum itu muncul karena adanya penolakan terhadap kesepakatan kerjasama ini oleh sebagian rakyat Swiss. Alasannya, dalam kerjasama tersebut termaktub kerjasama perdagangan komoditas minyak nabati antara Indonesia dan EFTA. Meski kesepakatan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan minyak sawit, tetapi minyak nabati, sebagian rakyat

Swiss telah menganggap bahwa kerjasama ini memfasilitasi perdagangan minyak sawit dari Indonesia. Penolakan sebagian rakyat Swiss ini diikuti dengan penandatanganan petisi. Petisi-petisi tersebut dikirimkan ke parlemen. Hasil review atas keabsahan petisi menyatakan bahwa Swiss harus melakukan referendum untuk memutuskan perkara ini.

Hasil referendum menyatakan bahwa 51,6% masyarakat Swiss menyetujui kesepakatan masuknya minyak nabati Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit dalam IE-CEPA. Hasil referendum tersebut diharapkan berdampak positif pada citra minyak sawit Indonesia di pasar global. Karena itu, ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki aspek-aspek keberlanjutan dari industri minyak sawit nasional.



## SWISS REFERENDUM TO STOP PALM OIL IMPORT



## IE-CEPA DAN POIN KESEPAKATAN PERDAGANGAN MINYAK NABATI INDONESIA

Setelah perundingan panjang selama 8 tahun dengan 15 kali putaran, akhirnya IE-CEPA disepakati pada 16 Desember 2018. IE-CEPA dimaksudkan untuk menyetujui tarif khusus (*preferential tariff*) yang memungkinkan eksportir Indonesia untuk memperoleh akses kuat ke pasar Eropa di luar sistem *Generalised System of Preferences* (GSP) dengan tarif yang lebih rendah atau akses bebas-pajak untuk impor.

Selanjutnya, dalam perjanjian tersebut, negara-negara EFTA akan berperan sebagai hub bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang beroperasi di pasar Eropa. Sehingga, Indonesia nantinya diharapkan mendapatkan manfaat dari aliran perdagangan EFTA dengan Uni Eropa dan juga dari aliran perdagangan EFTA dengan mitra perdagangan bebas lainnya di seluruh dunia.

Bagi negara-negara EFTA, kerjasama ini juga bermanfaat bagi perdagangan komoditas mereka dengan Indonesia. Misalnya, Swiss akan bekerjasama dalam perdagangan coklat, Norwegia akan memperkuat perdagangan komoditas perikanan, sedangkan Islandia memprioritaskan industri panas bumi.

Kesepakatan kerjasama ini tentu akan sangat menguntungkan bagi Indonesia dan negara-negara EFTA. Berdasarkan data perdagangan yang dirilis oleh UN Comtrade (2019), nilai total ekspor Indonesia ke Swiss mencapai USD 740.723.482 dengan komoditas

terbesar, yakni emas sebesar USD 366.771.565, coklat sebesar USD 193.151 dan kopi sebesar USD 114.469. Selanjutnya, nilai ekspor Indonesia ke Norwegia mencapai USD 87.549.777. Sedangkan, dengan Islandia, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 1.154.478. Pada saat yang sama, nilai ekspor Swiss ke Indonesia mencapai USD 491.136.176, nilai ekspor Norwegia ke Indonesia mencapai USD 147.004.306 dan nilai ekspor Islandia ke Indonesia mencapai USD 3.177.081.

Untuk komoditas minyak sawit sendiri, ini menjadi pengalaman pertama bagi Swiss menyepakati kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Secara bilateral, Indonesia dan Swiss sepakat memberikan kuota impor minyak sawit sebesar 10.000 ton, yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 12.500 ton selama lima tahun. Selain itu, Swiss sepakat untuk mengurangi bea masuk sebesar 20% sampai 40% terhadap komoditas minyak sawit dari Indonesia.

Meski demikian, kesepakatan di atas harus menghormati ketentuan pasal dalam Perjanjian IE-CEPA tentang pengelolaan minyak nabati berkelanjutan. Misalnya, minyak sawit dari Indonesia harus dikirim dalam tangki 22 ton untuk memastikan ketertelusurannya. Selain itu, masih banyak lagi kesepakatan perdagangan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 10 tentang "*Sustainable Management of the Vegetable Oils Sector and Associated Trade*" (lihat gambar 1)



# POIN KESEPAKATAN PERDAGANGAN MINYAK NABATI INDONESIA



**A** Secara efektif menerapkan hukum, kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk melindungi hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem terkait, menghentikan deforestasi, pengeringan gambut dan penggunaan api dalam pembukaan lahan, mengurangi polusi udara dan air, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan adat serta pekerja;



**B** Mendukung penyebaran dan penggunaan standar, praktik, dan pedoman keberlanjutan untuk minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan;



**C** Memastikan transparansi kebijakan dalam negeri dan langkah-langkah yang berkaitan dengan sektor minyak nabati;



**D** Bekerja sama dalam meningkatkan dan memperkuat standar pemerintah (jika berlaku);



**E** Memastikan bahwa minyak nabati dan turunannya yang diperdagangkan antara Para Pihak diproduksi sesuai dengan tujuan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a).

Gambar 1. Poin Kesepakatan Perdagangan Minyak Nabati Indonesia

Meski secara prinsip, poin-poin kesepakatan tersebut meminta komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola minyak sawit berkelanjutan, tapi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar minyak sawit, terutama yang sudah memenuhi standar keberlanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari IE-CEPA, Indonesia dan Swiss sedang berunding secara bilateral untuk menentukan persyaratan keberlanjutan minyak sawit, yang akan diatur lebih detail dalam *ordinance* (peraturan nasional Swiss).





## PETISI PENOLAKAN DAN REFERENDUM

Secara proses, kesepakatan IE-CEPA perlu diratifikasi oleh negara-negara EFTA. Saat Islandia dan Norwegia melakukan proses ratifikasi, perjanjian ini menghadapi gelombang penolakan oleh sebagian masyarakat Swiss.

Penolakan IE-CEPA diinisiasi oleh Uniterre, sebuah serikat petani Swiss, dan Willy Cretegnny, seorang petani anggur di Swiss. Mereka menolak poin kesepakatan perdagangan minyak nabati dari Indonesia, terkhususnya adalah minyak sawit. Alasannya, minyak sawit tidak layak masuk dalam perjanjian perdagangan bebas, karena merusak lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Melalui wawancaranya bersama Swissinfo (2021a), Willy Cretegnny mengungkapkan bahwa pemenuhan standar keberlanjutan bagi perkebunan sawit Indonesia sulit dicapai dan kebijakan tarif dan non tarif terhadap produk impor tidak harus selalu dipandang sebagai kebijakan proteksi atau anti perdagangan bebas.

Petisi penolakan digulirkan oleh sebuah komite yang diberi nama "Stop Palm Oil". Mereka berhasil mengumpulkan dukungan dari 50 organisasi dan petisi bertanda tangan lebih dari 50 ribu rakyat Swiss untuk menolak IE-CEPA. Meski demikian, tidak semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendukung petisi ini, seperti Public Eye dan Greenpeace (Swissinfo, 2021b).

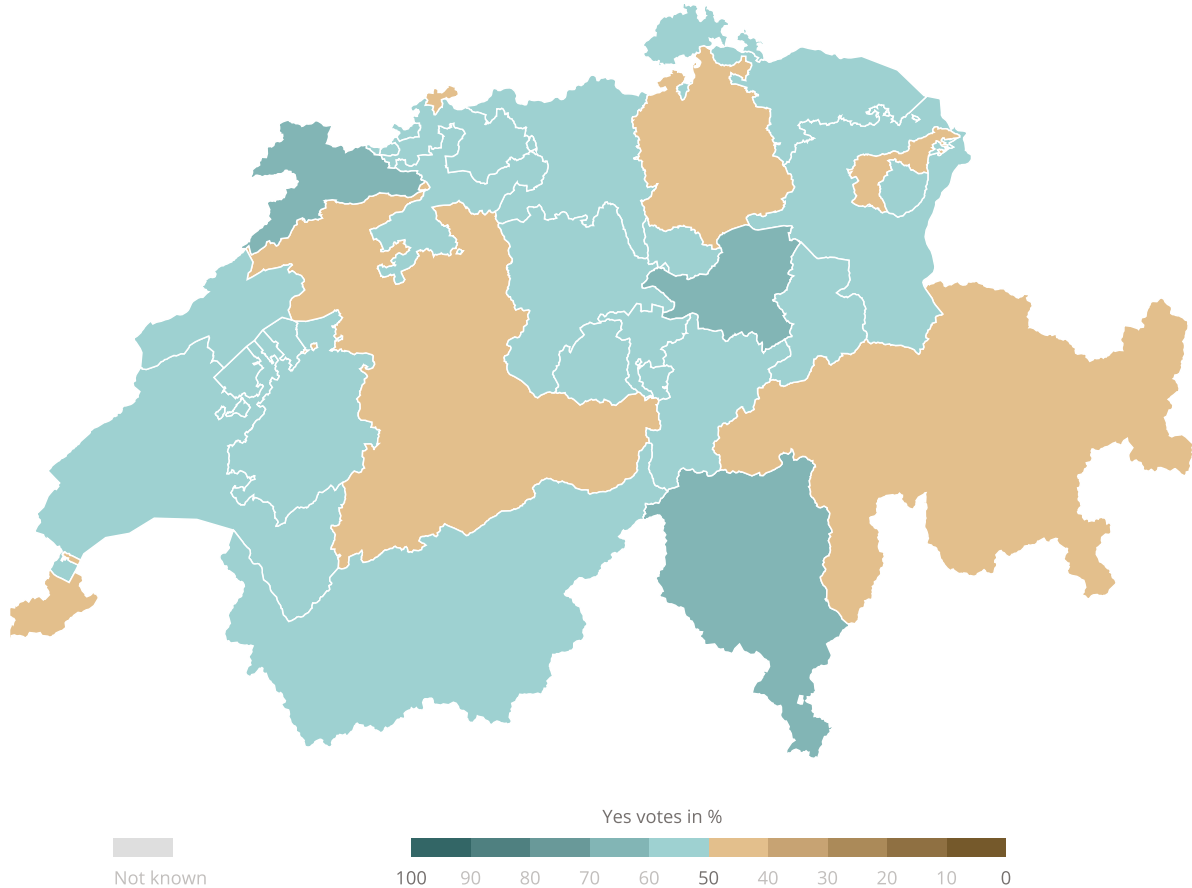
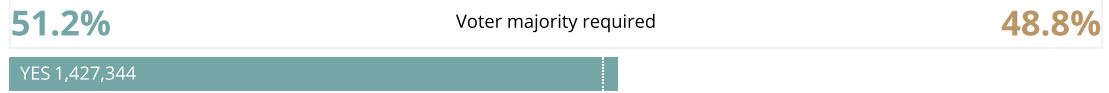
Willy Cretegnny menjelaskan dalam interviewnya bahwa beberapa LSM sulit membuat keputusan pada kasus ini, karena beberapa dari mereka sudah menjadi mitra sertifikasi sawit berkelanjutan (Swissinfo, 2021a). Selain itu, dukungan terhadap perdagangan bebas sangat kuat di dalam parlemen Swiss. Politisi sayap kanan Swiss menyatakan bahwa penolakan terhadap perdagangan bebas adalah ancaman bagi ketahanan ekonomi Swiss (Swissinfo, 2020). Bahkan dukungan itu juga berasal dari partai-partai sayap kiri seperti Partai Sosial Demokrat (Swissinfo, 2021b). Namun, seiring dengan semakin derasnya tekanan dari masyarakat, partai tersebut akhirnya mengubah posisinya.

Dokumen-dokumen petisi tersebut kemudian dikirimkan ke parlemen. Kanselier Federal mereview keabsahan dokumen-dokumen petisi tersebut. Sesuai aturan di Swiss, diperlukan mekanisme referendum untuk memutuskannya. Ini adalah referendum pertama dalam sejarah Swiss untuk memutuskan perkara perdagangan bebas. Referendum semula direncanakan untuk dilakukan pada bulan November 2020. Karena pandemic COVID-19, referendum ditunda sampai Maret 2021.

## HASIL REFERENDUM

### Switzerland

Vote from 07/03/2021



**Gambar 2.** Sebaran hasil referendum berdasarkan kanton  
(Sumber Gambar: Swissinfo, 2021b)

Setelah beberapa kali mengalami penundaan, pada 7 Maret 2021 lalu, referendum rakyat Swiss terhadap pengurangan bea masuk bagi minyak sawit Indonesia dalam IE-CEPA akhirnya dilakukan. Lebih dari 2,7 juta rakyat Swiss, terlibat dalam referendum tersebut. Hasil referendum menunjukkan 51,6% rakyat Swiss menyetujui kesepakatan terkait minyak sawit Indonesia dalam IE-CEPA, dengan perbedaan yang sangat tipis.

Swissinfo (2021b) melaporkan bahwa secara umum penolakan berasal dari kanton-kanton (wilayah) bagian barat Swiss seperti Geneva (dimana perusahaan-perusahaan komoditas pertanian dari Swiss berlokasi) dan Vaud (dimana kantor pusat

perusahaan makanan terbesar Swiss, yaitu Nestle beroperasi). Vaud sendiri merupakan kanton dengan tingkat penolakan terbesar, yaitu mencapai 65,9%. Sementara itu, Zurich - dimana peserta referendum terbanyak, yaitu lebih dari 470 ribu peserta - memilih menerima kesepakatan tersebut, dengan nilai voting sebesar 58,2%. Sedangkan, penerimaan terbesar berasal dari Kanton Nidwalden (peserta kurang dari 17 ribu), dengan nilai voting sebesar 62,7%.

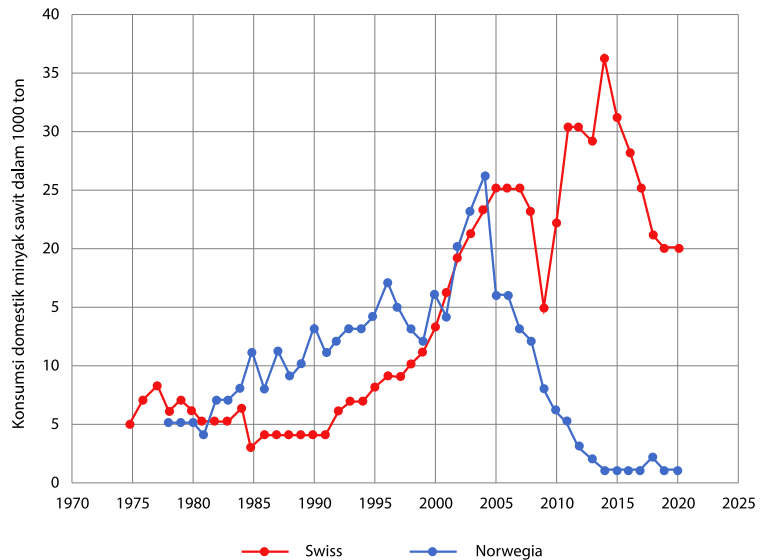
## DAMPAK HASIL REFERENDUM

Meski ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara EFTA relatif kecil, tapi referendum ini sangat memberikan dampak positif terhadap minyak sawit Indonesia. Karena negara-negara tersebut adalah aktor penting yang mempengaruhi perdagangan komoditas di Eropa, bahkan dunia. Dampak yang langsung dirasakan adalah meningkatnya citra positif minyak sawit Indonesia di pasar global, khususnya di Eropa.

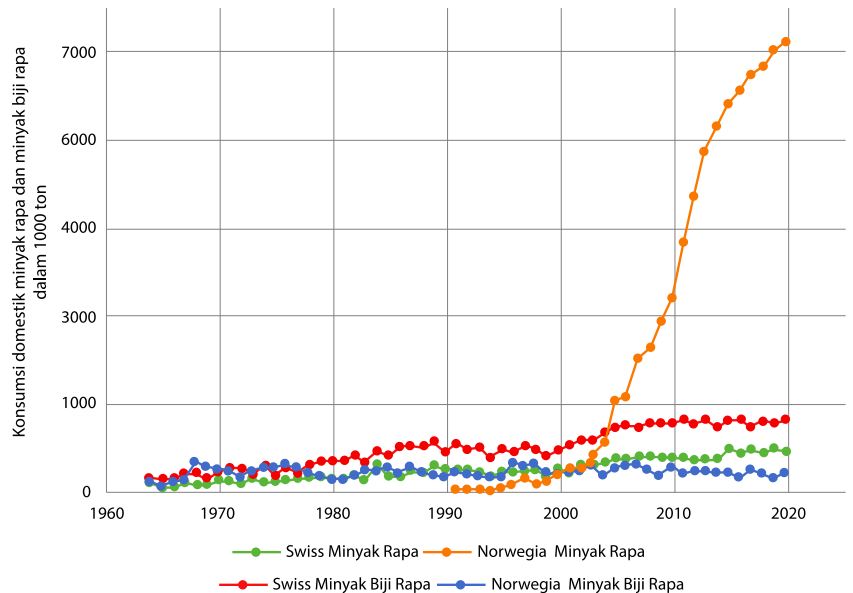
Secara statistik, konsumsi minyak sawit di negara-negara EFTA tersebut tidaklah besar. Misalnya, Norwegia dan Swiss, pada 2020, konsumsinya tak lebih dari 1.000 ton dan 20.000 ton. Meski pada 2004, konsumsi minyak sawit di Norwegia mencapai puncaknya, yaitu sebesar 26.000 ton, tapi setelah itu, terus mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi di Swiss, konsumsi minyak sawit di sana pernah mencapai puncaknya pada 2014, yaitu sebesar 36.000 ton, tapi setelah itu menurun. Pada saat yang sama, konsumsi minyak rapa dan minyak biji rapa terus meningkat setiap tahunnya (lihat Gambar 3 dan Gambar 4). Adanya perjanjian kerjasama tersebut berpotensi dapat meningkatkan perdagangan minyak sawit Indonesia di negara-negara EFTA tersebut.

Membangun citra positif terhadap minyak sawit Indonesia di pasar global akan menjadi poin utama pasca referendum ini. Hasil referendum akan mempengaruhi cara pandang masyarakat global, terutama Uni Eropa terhadap minyak sawit, yang selama ini lebih banyak dicitrakan negatif.

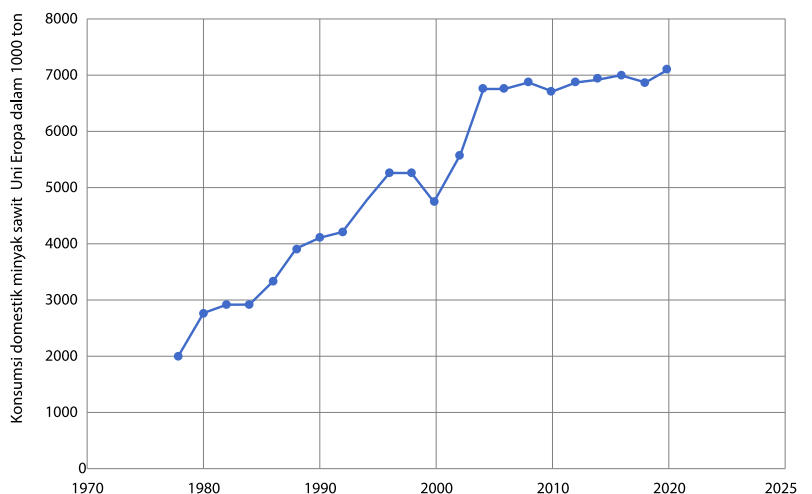
Tekanan terhadap perdagangan minyak sawit di Uni Eropa sangat masif, seperti keluarnya keputusan *Renewable Energy Directive (RED II)* pada 2018 dan menyatakan keraguan pada standar keberlanjutan minyak sawit yang ada di Indonesia. Dengan hasil referendum Swiss, semua pihak kembali meletakkan kepercayaan pada pentingnya pemenuhan standar keberlanjutan minyak sawit dengan menjadikannya prasyarat penting dalam perdagangan minyak sawit global. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola minyak sawit berkelanjutan.



**Gambar 3.** Konsumsi domestik minyak kelapa sawit dua negara EFTA (Sumber: USDA dalam Index Mundi, 2021)



**Gambar 4.** Konsumsi domestik minyak rapa dan minyak biji rapa dari dua negara EFTA (Sumber: USDA dalam Index Mundi, 2021)



**Gambar 5.** Konsumsi minyak kelapa sawit di Uni Eropa (Sumber: USDA dalam Index Mundi, 2021)



## KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

Kepercayaan masyarakat global terhadap komoditas minyak sawit Indonesia adalah hal terpenting yang terus dijaga dan ditingkatkan. Hasil referendum Swiss adalah bukti bahwa standar tata kelola minyak sawit berkelanjutan menjadi kunci keberterimaan pasar bagi minyak sawit. Karena itu, tidak ada hal yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat perdagangan minyak sawit, selain terus memperbaiki tata kelolanya.

Selama ini, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, petani sawit, NGO, dan perguruan tinggi, Pemerintah Indonesia telah mengusahakan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan. Ada beberapa perbaikan kunci yang sudah dilakukan, antara lain:



- A. Penerbitan **Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018** tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, memperkuat kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan pembinaan bagi petani sawit dan peningkatan produktivitas lahan dengan penerapan *good agriculture practices*.
- B. Penerbitan **Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019** tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kela-

pa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sebagai peta jalan pembangunan sektor kelapa sawit berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan sawit sebagai sumber energi baru dan terbarukan, meningkatkan diplomasi perkebunan sawit berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya pelaksanaan perkebunan sawit berkelanjutan.

- C. Penerbitan **Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019** tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017. Tujuannya adalah menghentikan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi), dan areal penggunaan lain yang tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).
- D. Penerbitan **Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020** tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Tujuannya adalah memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional dan meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

## USAHA YANG BELUM SELESAI

Hasil referendum Swiss menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia masih dipandang kredibel di pasar minyak nabati global, terutama bagi masyarakat Swiss. Tapi jalan menuju keberterimaan pasar secara luas masih panjang. Kesepakatan dari kerjasama IE-CEPA masih mengatur mekanisme teknis perdagangan minyak sawit. Misalnya, Pemerintah Swiss akan menyusun *ordinance* (peraturan nasional Swiss) menyangkut persyaratan keberlanjutan minyak sawit Indonesia yang akan diperdagangkan di Swiss.

Secara substansi, Pasal 8 Ayat 10 tentang *"Sustainable Management of the Vegetable Oils Sector and Associated Trade"*, telah memuat poin-poin standar kerjasama perdagangan untuk minyak nabati, termasuk minyak sawit. Pasal tersebut akan diturunkan secara teknis dalam *ordinance* oleh Pemerintah Swiss. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus tetap mengawal penyusunan *ordinance* tersebut agar posisi Indonesia dalam tata laksana perdagangan minyak sawit dengan Swiss berimbang.

Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, memastikan sistem kuota impor dan tarif bea masuk tidak memberatkan posisi Indonesia dalam perdagangan. Hal ini penting dikawal, karena pada prinsipnya, penerapan sistem kuota impor dan bea masuk tersebut merupakan bagian dari hambatan perdagangan. Dampaknya akan menurunkan daya saing komoditas minyak sawit Indonesia di pasar Swiss. Karena itu, Pemerintah Indonesia perlu memastikan hal tersebut tidak menurunkan daya saing minyak sawit Indonesia.

Kedua, Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan standar keberlanjutan minyak sawit yang diatur dalam ordinance mengacu pada sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Hal ini penting dilakukan agar standar keberlanjutan yang menjadi acuan Swiss dalam perdagangan nantinya kompatibel dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem sertifikasi ISPO.

Dalam aspek domestik, kita masih punya agenda dalam mewujudkan tata kelola minyak sawit berkelanjutan. Agenda ini harus terus dijalankan secara optimal. Karena, inilah sebenarnya inti dari keberterimaan pasar bagi minyak sawit Indonesia di pasar global. Adapun beberapa penguatan dalam menuju perbaikan tata kelola minyak sawit berkelanjutan: Pertama, memastikan kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini mendapatkan respon positif oleh mitra dagang Indonesia, termasuk Swiss. Banyak pihak menganggap kebijakan tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan.

Kedua, memperkuat sistem sertifikasi ISPO sebagai instrumen perdagangan minyak sawit berkelanjutan di pasar global. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia harus bisa menyakinkan pasar global terkait pemenuhan standar minyak sawit berkelanjutan. Sistem sertifikasi ISPO harus menjadi instrumen utama dalam perdagangan minyak sawit. Karena itu, penguatan sistem sertifikasi ISPO harus terus dilakukan, terutama dalam aspek keberterimaan pasar.

Jika semua hal tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, kita bisa berharap hasil referendum Swiss adalah harapan terhadap kemajuan industri minyak sawit Indonesia. Namun, jika sebaliknya, minyak sawit Indonesia masih akan terus mendapatkan tekanan di pasar global, terutama di Swiss melalui berbagai hambatan, baik tarif maupun non tarif. Untuk itu, mari kita jadikan referendum ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri minyak sawit di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Index Mundi. 2021. Palm oil domestic consumption by year. [Indexmundi.com](https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=ch&commodity=palm-oil&graph=domestic-consumption). Dilihat pada 24 Mar 2021. <<https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=ch&commodity=palm-oil&graph=domestic-consumption>>.
- Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Inpres No. 8 Tahun 2018, 2018.
- Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, Inpres No. 6 Tahun 2019, 2019.
- Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Inpres No. 5 Tahun 2019, 2019.
- Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Perpres No. 44 Tahun 2020, LN No. 75 tahun 2020.
- Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Perpres No.18 Tahun 2020, LN No.10 Tahun 2020.
- Indonesia and European Free Trade Association (EFTA) States. 2018. Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States.
- Swiss Confederation. 2020. Fact sheet: Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the EFTA States and Indonesia. Swiss Confederation. Dilihat pada 25 Mar 2021. <[https://www.seco.admin.ch/dam/seco/en/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/Partner%20weltweit/Indonesien/factsheet\\_indonesien\\_februar\\_2020.pdf.download.pdf/E\\_Factsheet\\_Indonesien\\_Februar\\_2020.pdf](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/en/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Freihandelsabkommen/Partner%20weltweit/Indonesien/factsheet_indonesien_februar_2020.pdf.download.pdf/E_Factsheet_Indonesien_Februar_2020.pdf)>.
- Swissinfo. 2021a. We need a global vision of sustainability. [Swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch/eng/votations-du-7-mars-we-need-a-global-vision-of-sustainability-46357272). Dilihat pada 25 Mar 2021. <<https://www.swissinfo.ch/eng/votations-du-7-mars-we-need-a-global-vision-of-sustainability-46357272>>.
- Swissinfo. 2021b. Swiss free trade deal with Indonesia narrowly survives referendum. [Swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-direct-democracy-could-undo-a-free-trade-deal-with-indonesia/46422650). Dilihat pada 24 Mar 2021. <<https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-direct-democracy-could-undo-a-free-trade-deal-with-indonesia/46422650>>.
- Swissinfo. 2020. Thousands of signatures submitted against Indonesian palm oil. [Swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch/eng/thousands-of-signatures-submitted-against-indonesian-palm-oil/45855360). Dilihat pada 24 Mar 2021. <<https://www.swissinfo.ch/eng/thousands-of-signatures-submitted-against-indonesian-palm-oil/45855360>>.
- UN Comtrade. 2019. Database. [comtrade.un.org](https://comtrade.un.org). Dilihat pada 23 Maret 2021. <<https://comtrade.un.org/data/>>.

## Tentang Penulis

### Anita Permatasari

Knowledge Management and Communication Specialist. Email: [anita.permatasari@kehati.or.id](mailto:anita.permatasari@kehati.or.id)

### Muhammad Ichsan

Peneliti independen bidang kebijakan publik terkait sumber daya alam. Email: [ichsan.mbo@gmail.com](mailto:ichsan.mbo@gmail.com)

### Wiko Saputra

Peneliti Independen Bidang Kebijakan Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Email: [wikosa24@gmail.com](mailto:wikosa24@gmail.com)